



STATISIK INDUSTRI MIKRO KECIL PROVINSI ACEH

2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**



**STATISIK INDUSTRI MIKRO KECIL
PROVINSI ACEH**

2015

STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2015

Katalog BPS : 6104006.11
No. Publikasi : 11532.1501
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : 50 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Aceh

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Industri Mikro Kecil (IMK) Provinsi Aceh 2015 merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2015 (VIMK15) yang dilaksanakan pada bulan Juli 2015 dengan metode sampel, dalam publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri manufaktur yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 - 19 orang, yang meliputi antara lain; banyaknya usaha industri mikro dan kecil, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran dan pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, kemitraan usaha, serta pemasaran produksi Industri dan Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh.

Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah maupun konsumen data. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan referensi untuk berbagai penelitian atau studi khusus yang berkaitan dengan industri mikro dan kecil.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi khususnya para responden, nara sumber, serta tim yang telah menyelesaikan publikasi ini.

Banda Aceh, Agustus 2016
KEPALA BPS PROVINSI ACEH



WAHYUDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
PENJELASAN UMUM.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Lingkup dan Cakupan	2
D. Dokumen yang Digunakan.....	2
E. Metodologi	3
F. Organisasi Lapangan	4
G. Konsep dan Definisi.....	4
ULASAN RINGKAS	14
A. Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja	14
B. Balas Jasa Pekerja	16
C. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja	17
D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran	21
LAMPIRAN TABEL	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2015	14
Tabel 2 Persentase Usaha dan Tenaga Kerja menurut Status Pekerja Tahun 2015	15
Tabel 3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2015	17
Tabel 4 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2015	20
Tabel 5 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerja Tahun 2015	21
Tabel 6 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2015	24
Tabel 7 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2015	27
Tabel 8 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan yang Diterima Setahun yang Lalu Tahun 2015	28

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gambar 1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan Tahun 2015 16
Gambar 2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2015 18
Gambar 3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2015 19
Gambar 4	Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2015 20
Gambar 5	Persentase Usaha Mikro Kecil menurut Sumber Modal Tahun 2015 22
Gambar 6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Asal Pinjaman Utama Tahun 2015 23
Gambar 7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2015 24
Gambar 8	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2015 25
Gambar 9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalin Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2015 26
Gambar 10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2015 27
Gambar 11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/ Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2015 29
Gambar 12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima pelayanan/Bantuan Tahun 2015 29
Gambar 13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran di Provinsi Aceh Tahun 2015 30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2015	32
Tabel 2 Persentase Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2015..	32
Tabel 3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2015	33
Tabel 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2015	33
Tabel 5 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2015	34
Tabel 6 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2015	34
Tabel 7 Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2015	35
Tabel 8 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan di Provinsi Aceh Tahun 2015	35
Tabel 9 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan per Triwulan di Provinsi Aceh Tahun 2015	36
Tabel 10 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2015	36
Tabel 11 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Asal Pinjaman Utama di Provinsi Aceh Tahun 2015	37
Tabel 12 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2015	37
Tabel 13 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2015	38
Tabel 14 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2015	38
Tabel 15 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi dan Jenis Pelayanan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2015	39
Tabel 16 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2015	39

Tabel 17	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2015	40
Tabel 18	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2015	40
Tabel 19	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2015	41
Tabel 20	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran dan Pemasaran ke luar negeri di Provinsi Aceh Tahun 2015	41

<http://aceh.bps.go.id>

Penjelasan Umum

<http://aceh.bps.go.id>

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus mensyaratkan jenjang pendidikan formal yang tinggi. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri, khususnya IMK cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam era pasca krisis ekonomi dan otonomi daerah saat ini, pengumpulan data statistik IMK mempunyai arti yang sangat strategis. Data yang dihasilkan merupakan masukan yang sangat berguna untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya usaha IMK.

Pengumpulan data IMK mulai tahun 2009 dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pengumpulan data sebelumnya dilakukan hanya secara periodik melalui sensus atau survei. Pengumpulan data IMK dilaksanakan secara lengkap melalui sensus industri 1974/1975. Kemudian Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga (IKKR) tahun 1982, Sensus Ekonomi tahun 1986 (SE86), kemudian tahun 1991, 1993, 1994, dan 1995 melalui survei IKKR. Data IMK tahun 1996 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 1996 (SE96) dan sejak tahun 1998-2005 data IMK dikumpulkan melalui Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), sedangkan data IMK tahun 2006 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE06).

Survei Industri Mikro dan Kecil 2015 (VIMK15) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan dalam VIMK15 sampel dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

B. Tujuan

Secara umum VIMK15 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi di Aceh yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK15 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional.

Secara khusus tujuan VIMK15 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut dua digit KBLI, sebagai estimasi indikator IMK seperti:

- a. Banyaknya usaha
- b. Banyaknya tenaga kerja
- c. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- d. Struktur input dan output
- e. Kendala dan pemasaran
- f. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

C. Lingkup dan Cakupan

VIMK15 ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota daerah potensi seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 7.988 blok sensus dan mencakup 60.000 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Untuk wilayah Aceh terpilih sebanyak 215 blok sensus yang mencakup 1.863 perusahaan/usaha mikro dan kecil untuk seluruh kabupaten/kota. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

D. Dokumen yang digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2015 serta kegunaannya sebagai berikut:

1. **VIMK15-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus)**, digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. **VIMK15-L2 (Listing)**, digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. **VIMK15-DS2 (Daftar Sampel)**, digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
4. **VIMK15-S2 (Sampel)**, digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
5. **VIMK15-RB2 (Rekap Blok Sensus)**, digunakan untuk merekap jumlah Industri Mikro dan Kecil per blok sensus.
6. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI industri manufaktur, dan pedoman pengolahan.

E. Metodologi

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

- a) Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE06).
- b) Kerangka sampel usaha adalah daftar usaha hasil pendaftaran Survei IMK 2015. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro.

2. Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus yang digunakan pada Survei IMK 2015 sama dengan stratifikasi yang dibentuk berdasarkan hasil SE2006. Tujuan dilakukannya stratifikasi blok sensus adalah untuk mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah relatif usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah merupakan sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi dilakukan pada level kabupaten/kota.

3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan yaitu rancangan penarikan sampel dua tahap terstratifikasi.

Tahap pertama: memilih sejumlah blok sensus pada setiap strata secara PPS (*probability proportional to size*) dengan *size* banyaknya IMK hasil SE2006. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara *independent*.

Kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus terstratifikasi dari seluruh kabupaten/kota terpilih dalam satu provinsi.

Tahap kedua: mengambil seluruh industri kecil dan memilih sejumlah industri mikro dari hasil *listing* secara sistematis linier untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih.

F. Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK15, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai *subject matter* adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK15 adalah :

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS.
- b. Petugas Pemeriksa (PMS): Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Koordinator pelaksanaan di Kecamatan : KSK (aparatur BPS pada tingkat kecamatan).
- d. Koordinator pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota: Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- e. Koordinator pelaksanaan di tingkat Provinsi : Kepala BPS Provinsi.

G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK15.

- a. **Industri Manufaktur:** Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri pengolahan (*makloon*).
- b. **Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur:** Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri pengolahan; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. **Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur:** Unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (nilai upah *makloon*).
- d. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum,

formal atau informal. KBLI 2009 menggunakan kode 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi.

e. **Produksi utama** yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:

- 1) Produksi yang mempunyai **nilai produksi/jasa industri** terbesar;
- 2) Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
- 3) Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
- 4) Jika nilai produksi/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

f. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**

- 1) **Tidak tamat SD** : Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap belum tamat.
- 2) **SD & sederajat** : Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100.
- 3) **SLTP & sederajat** : Mereka yang tamat SMP, MULO, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, SMEP, ST, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.
- 4) **SLTA & sederajat** : Mereka yang tamat dari Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, dan Sekolah Menengah Teknologi Grafika.

- 5) **DI/DII** : Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas, Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.
- 6) **Sarjana Muda/ DIII** : Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda, dinyatakan sebagai tamatan SLTA & sederajat.
- 7) **DIV, S1 atau Lebih** : Mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV, Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor (Strata-3). Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

g. Tahun Mulai Beroperasi/Berproduksi secara Komersial

Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru. Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

h. Tenaga Kerja

- 1) **Tenaga kerja tetap dibayar** : Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) **Tenaga kerja tetap tidak dibayar** : Tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha **tidak termasuk sebagai pekerja**.

- 3) **Tenaga kerja produksi** : Tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.
 - 4) **Tenaga kerja lainnya** : Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.
- i. **Balas jasa pekerja dibayar (dalam rupiah):** Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.
- 1) **Upah/gaji** : Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
 - 2) **Upah lembur** : Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
 - 3) **Hadiah** : Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
 - 4) **Bonus** : Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.
 - 5) **Tunjangan** : Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- j. **Biaya Umum** : Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:
- 1) **Bahan Baku** : Komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.
 - 2) **Bahan Penolong** : Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.

- 3) Bahan Bakar** : Segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
- 4) Pelumas**: Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.
- 5) Pemakaian Listrik**
Biaya listrik: Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.
- 6) Pemakaian Air**
Biaya pemakaian air bersih: Biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.
- 7) Pemakaian Gas Kota**
Biaya gas kota: Biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.
- 8) Alat tulis dan keperluan kantor**: Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.
- 9) Bunga atas pinjaman**: Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2012, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.
- 10) Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi**: Seluruh biaya pengangkutan/ pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.
- 11) Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal**: Pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.
- 12) Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/ konstruksi, dan barang modal lainnya** : Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran

untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal.

Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

13) Sewa tanah untuk usaha : Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.

14) Pajak tak langsung : Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

15) Jasa lainnya

Pembayaran jasa lainnya : Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan : Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

Biaya untuk asuransi kerugian : Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan : Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

k. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (makloon), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) **Pendapatan utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) **Pendapatan dari kegiatan lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) **Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

I. Harta yang dimiliki

- 1) **Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) **Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.
- 3) **Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan/gedung
 - c. Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
 - d. Kendaraan
 - e. Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)

m. Sumber modal : Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap.

Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) **Milik sendiri :** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/ usaha/ pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.
- 2) **Pihak lain :** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam

IMK15 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.

- a. **Bank** : Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
- b. **Koperasi** : Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- c. **Lembaga Keuangan Bukan Bank** : Lembaga keuangan selain Bank dan Koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- d. **Modal Ventura** : Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e. **Keluarga/famili** : Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.
- f. **Lainnya** : Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

n. Kendala dan Pemasaran

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2015, keanggotaan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

- 1) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan**: Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- 2) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial**: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.

- 3) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/teknik produksi:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.
- 4) **Bimbingan/penyuluhan pemasaran:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.
- 5) **Kemitraan:** Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada Publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil 2015 ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) rev. 4 Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

a. Industri Makanan	KBLI: 10
b. Industri Minuman	KBLI: 11
c. Industri Pengolahan Tembakau	KBLI: 12
d. Industri Tekstil	KBLI: 13
e. Industri Pakaian Jadi	KBLI: 14
f. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	KBLI: 15
g. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya.	KBLI: 16
h. Industri Kertas dan barang dari Kertas	KBLI: 17
i. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI: 18
j. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	KBLI: 20
k. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI: 21
l. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	KBLI: 22
m. Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI: 23
n. Industri Logam Dasar	KBLI: 24
o. Industri Barang Logam bukan Mesin dan - Peralatannya	KBLI: 25
p. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk lainnya)	KBLI: 28
q. Industri Alat Angkut Lainnya	KBLI: 30
r. Industri Furnitur	KBLI: 31
s. Industri Pengolahan Lainnya	KBLI: 32
t. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan - Peralatannya	KBLI: 33

Ulasan Ringkas

<http://aceh.bps.go.id>

ULASAN RINGKAS

Pembangunan sektor industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan sektor industri dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2015 sumbangan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Aceh memang belum memperlihatkan kontribusi yang besar, namun demikian Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu bagian dari sektor industri pengolahan yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di suatu daerah. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan kegiatan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan dapat segera diatasi.

A. Jumlah Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja

Dari hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2015 (VIMK2015) tercatat jumlah usaha IMK di Aceh sebanyak 65.492 usaha (Tabel 1). Umumnya kegiatan yang diusahakan adalah industri makanan, minuman, industri tekstil (kerajinan sulaman/bordir), industri pakaian jadi, industri kayu dan bahan dari kayu, industri anyaman dari rotan, bambu dan sebagainya. Secara nasional jumlah usaha IMK di Aceh hanya sebesar 1,79 persen dari jumlah usaha IMK nasional, dimana jumlah seluruh usaha IMK di Indonesia mencapai 3,67 juta usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 angka ini sedikit menurun, dimana persentase usaha industri untuk Aceh pada tahun lalu sebesar 2,03 persen atau sebanyak 71.031 usaha dari jumlah IMK nasional yaitu 3,51 juta usaha.

Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2015

Provinsi	Kelompok Tenaga Kerja					Jumlah
	1	2-4	5-9	10-14	15-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34 217	29 792	1 353	130	0	65 492
%	52.24	45.49	2.07	0.20	0.00	100.00
Indonesia	1 316 278	2 069 573	210 975	48 540	23 507	3 668 873
%	35.88	56.41	5.75	1.32	0.64	100.00

Usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang dikategorikan sebagai Industri Mikro (IM) sedangkan usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang dikategorikan sebagai Industri Kecil (IK). Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha industri mikro sangat mendominasi survei ini yaitu mencapai 97,73 persen dari jumlah total usaha industri sebanyak 65.492 usaha. Sedangkan selebihnya 2,27 persen merupakan usaha industri kecil. Kondisi yang sama juga terjadi secara nasional dimana persentase usaha industri mikro mencapai 92,29 persen, sedangkan usaha industri kecil 7,71 persen.

Sebagian besar tenaga kerja pada usaha Industri Mikro dan Kecil di Aceh Tahun 2015 dilakukan oleh pekerja tidak dibayar (*unpaid workers*). Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, persentase tenaga kerja tidak dibayar di Aceh lebih besar dari tenaga kerja dibayar yaitu sebesar 72,08 persen atau sebanyak 88.301 orang, dan selebihnya 27,92 persen merupakan pekerja dibayar yaitu sejumlah 34.204 orang dari total tenaga kerja sebanyak 122.505 orang. Begitu juga halnya dengan kondisi nasional, usaha IMK yang melibatkan pekerja dibayar persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja tidak dibayar. Dimana terdapat sebanyak 36,87 persen pekerja dibayar atau sejumlah 3,22 juta orang, sedangkan 63,13 persen adalah sebagai pemilik atau pekerja keluarga yang tidak dibayar yaitu sebanyak 5,51 juta orang.

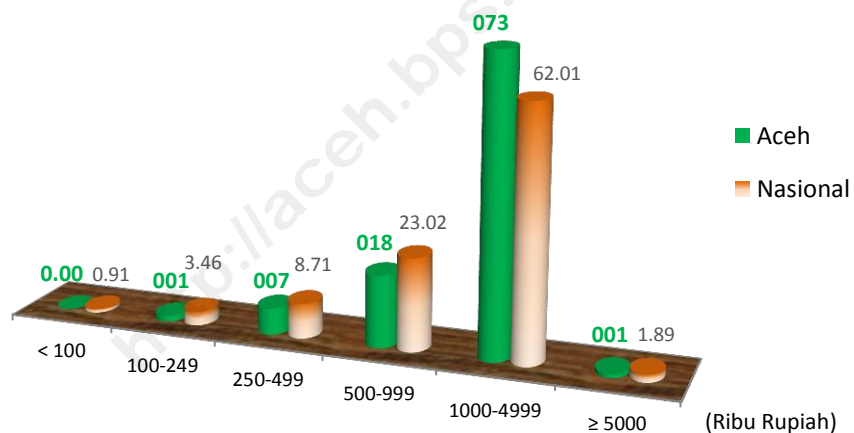
Tabel 2. Persentase Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja Tahun 2015

Provinsi	Persentase Usaha	Tenaga Kerja		
		Dibayar	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1.79	27.92	72.08	100.00
Indonesia	100.00	36.87	63.13	100.00

B. Balas Jasa Pekerja

Secara nasional, penyerapan tenaga kerja IMK di Provinsi Aceh pada tahun 2015 adalah sebanyak 1,40 persen dengan rata-rata balas jasa pekerja 0,80 persen. Jika dilihat dari besarnya balas jasa pekerja memperlihatkan sebaran yang hampir sama antara usaha IMK di Aceh dan secara nasional. Untuk usaha IMK di Aceh persentase tertinggi adalah pekerja dengan rata-rata upah per bulan di atas 1 juta rupiah yang mencapai 74,03 persen. Ini artinya upah pekerja usaha industri mikro dan kecil di Aceh sudah memiliki tingkatan yang lebih baik. Sedangkan persentase tertinggi untuk usaha IMK nasional juga pada nilai upah di atas 1 juta rupiah per bulan yang mencapai 63,90 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan Tahun 2015



Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2015 jika dilihat dari jumlah hari kerja yang mendominasi adalah usaha dengan jumlah hari kerja maksimum (21-31 hari) yaitu sebanyak 54,36 persen dengan rata-rata 6 jam kerja per hari. Sedangkan usaha IMK dengan jumlah hari kerja 1-10 hari hanya sebesar 18,87 persen saja dan sisanya 26,77 persen berada pada rentang 11-20 hari kerja dengan rata-rata jam kerja masing-masing adalah 7 jam dan 6 jam per hari. Begitu halnya dengan kondisi nasional, usaha IMK sebahagian besar memiliki jumlah hari kerja 21-31 hari atau sebesar 66,20 persen dengan rata-rata jam kerja adalah 7 jam per hari.

Tabel 3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2015

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan					
	1-10		11-20		21-31	
	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari	Banyaknya Usaha (%)	Rata2 Jam Kerja/Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	18.87	7	26.77	6	54.36	6
Indonesia	10.05	6	23.75	6	66.20	7

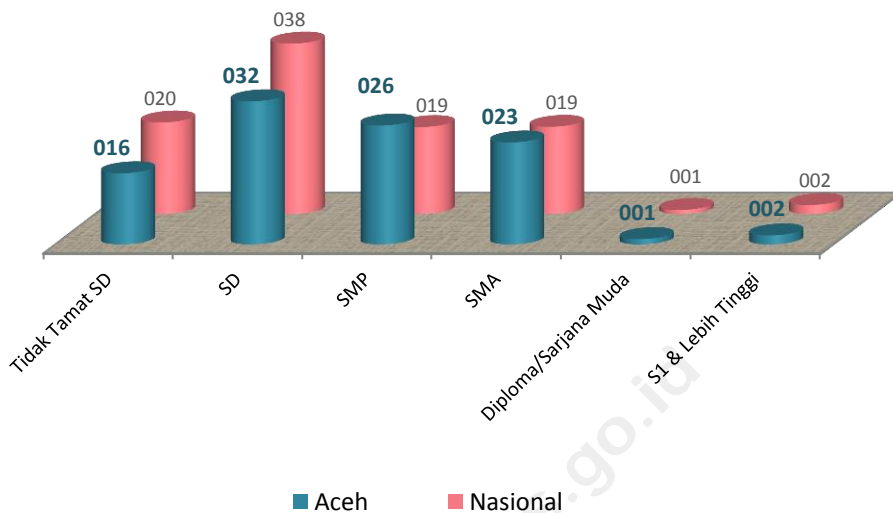
C. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja

Secara umum usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh berdasarkan hasil survei tahun 2015 jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pengusaha, persentase terbesar adalah usaha IMK dengan pendidikan tamatan SD dan tamatan SMP. Sebanyak 31,86 persen usaha industri yang pengusahanya menamatkan pendidikan SD dan yang tamat SMP sebesar 26,46 persen. Sedangkan yang tidak tamat SD persentasenya sebesar 15,83 persen. Untuk kondisi nasional angkanya lebih besar yaitu sebanyak 37,94 persen usaha IMK dengan pendidikan yang ditamatkan pengusaha adalah tingkat SD dan 19,36 persen tamatan SMP. Sedangkan pengusaha dengan pendidikan tidak tamat SD lebih besar persentasenya dari pada tamatan SMP yaitu 20,37 persen.

Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan pengusaha pada tingkat Sarjana (S1) atau lebih tinggi hanya sebesar 1,99 persen untuk Provinsi Aceh. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2,32 persen. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan angka nasional persentasenya tidak jauh berbeda yaitu 2,01 persen.

Kondisi ini menggambarkan bahwa usaha IMK umumnya dijalankan oleh pengusaha dengan tingkat pendidikan rendah. Sedangkan usaha dengan tingkat pendidikan lebih tinggi yang ditamatkan pengusaha hanya sedikit jumlahnya. Hal ini juga memberi sedikit gambaran bahwa pengusaha IMK minim keahlian, dan dapat dikatakan keahliannya dalam berusaha hanya secara turun temurun atau otodidak maupun berasal dari pengalaman.

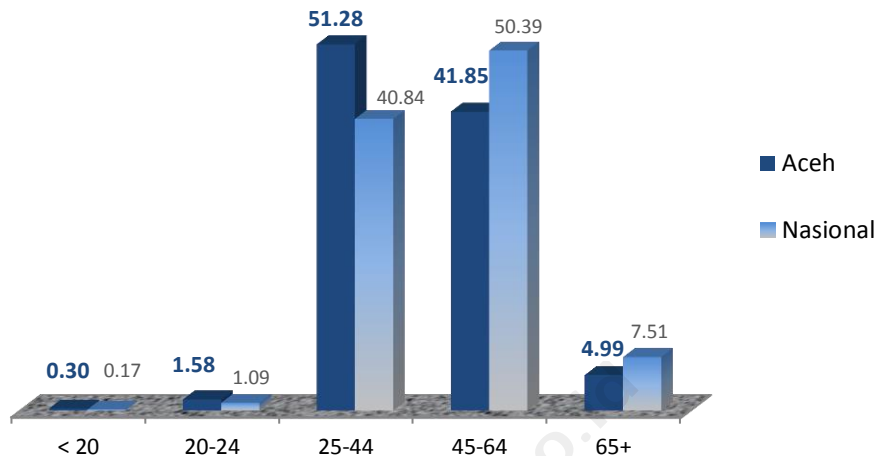
Gambar 2.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2015



Pada tahun 2015 usaha IMK di Provinsi Aceh didominasi oleh pengusaha dengan kelompok umur produktif yaitu 25-64 tahun. Ini merupakan suatu kewajaran bila pada jenjang usia tersebut mengharuskan seseorang mempunyai penghasilan karena sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Umur 64 tahun dianggap umur maksimal dapat melakukan usaha, karena terkendala banyak hal diantaranya faktor kesehatan, kemampuan dalam mengingat dan sebagainya. Namun demikian masih ada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pada umur 65 tahun ke atas, meskipun persentasenya cukup kecil.

Berdasarkan kelompok umur pengusaha, sebagian besar usaha mikro kecil di Aceh pengusahanya berada pada kelompok umur 25-44 tahun yang mencapai 51,28 persen. Kemudian disusul dengan kelompok umur pengusaha 45-64 tahun sebanyak 41,85 persen. Persentase terkecil adalah usaha dengan kelompok umur di bawah 20 tahun yaitu 0,30 persen. Adapun secara nasional persentase usaha pada kelompok umur pengusaha 45-64 tahun lebih mendominasi yaitu sebesar 50,39 persen. Sedangkan kelompok umur dibawah 20 tahun persentasenya hanya 0,17 persen.

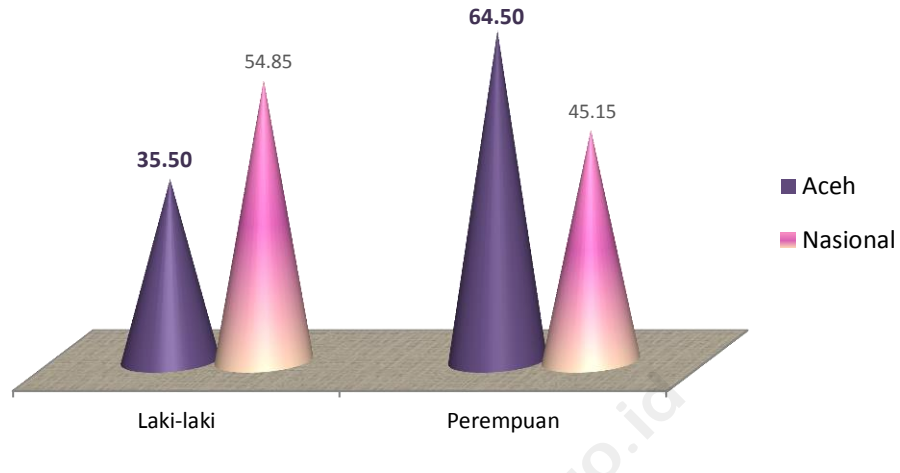
Gambar 3.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha
Tahun 2015



Peran *Gender* dalam usaha IMK sangatlah berpengaruh. Hal ini terlihat dari persentase tenaga kerja pada usaha IMK Aceh yang lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Persentase tenaga kerja perempuan pada tahun 2015 mencapai 64,50 persen atau sebanyak 79.014 orang, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang memiliki jumlah persentase 66,49 persen. Sedangkan tenaga kerja laki-laki meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 35,50 persen atau sejumlah 43.491 orang dari total 122.505 tenaga kerja.

Dibandingkan dengan nasional, komposisi tenaganya berkebalikan dengan Provinsi Aceh yaitu persentase laki-laki sedikit lebih besar mencapai 54,85 persen, dan tenaga kerja perempuannya sebesar 45,15 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa Industri Mikro dan Kecil bukan hanya menjadi kegiatan usaha utama bagi laki-laki, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan baik untuk menopang ekonomi rumah tangga ataupun usaha sampingan untuk membantu menambah penghasilan.

Gambar 4.
Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil
menurut Jenis Kelamin Tahun 2015



Pada usaha Industri Mikro dan Kecil hampir seluruh tenaga kerja merupakan pekerja produksi, dengan persentase di atas 95 persen. Hal ini disebabkan karena jenis pekerjaan utama adalah kegiatan yang langsung berhubungan dalam proses produksi, seperti pekerja yang secara langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, maupun mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan. Sedangkan untuk jenis pekerjaan lainnya tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pekerja pendukung perusahaan seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dan lain-lain.

Tabel 4. Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2015

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah		
	Jenis Tenaga Kerja		Jenis Tenaga Kerja		Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Produksi	Lainnya	Produksi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	34.96	0.55	63.69	0.80	98.65	1.35	100.00
Indonesia	52.29	2.56	43.51	1.64	95.80	4.20	100.00

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil tahun 2015 di Aceh adalah pekerja tidak dibayar. Terdapat perbedaan komposisi pekerja menurut jenis kelamin terhadap statusnya sebagai pekerja dibayar dan tidak dibayar. Untuk pekerja dibayar, jumlah pekerja laki-laki lebih besar dari pada pekerja perempuan dengan persentase 14,60 persen pekerja laki-laki dan 13,32 persen untuk pekerja perempuan. Sedangkan pekerja tidak dibayar persentase perempuan lebih besar yaitu 51,18 persen dan pekerja laki-laki 20,90 persen.

Adapun secara nasional persentase tenaga kerja laki-laki sebagai pekerja dibayar adalah 24,86 persen, dan pekerja tidak dibayar 29,99 persen. Sedangkan persentase tenaga kerja perempuan sebagai pekerja dibayar lebih kecil yaitu 12,01 persen dan pekerja tidak dibayar sebesar 33,14 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih mendominasi pada usaha IMK khususnya untuk pekerja dengan status dibayar baik di Aceh maupun skala nasional, sedangkan tenaga kerja perempuan lebih cenderung berstatus tidak dibayar atau pekerja keluarga.

Tabel 5. Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan status Pekerja Tahun 2015

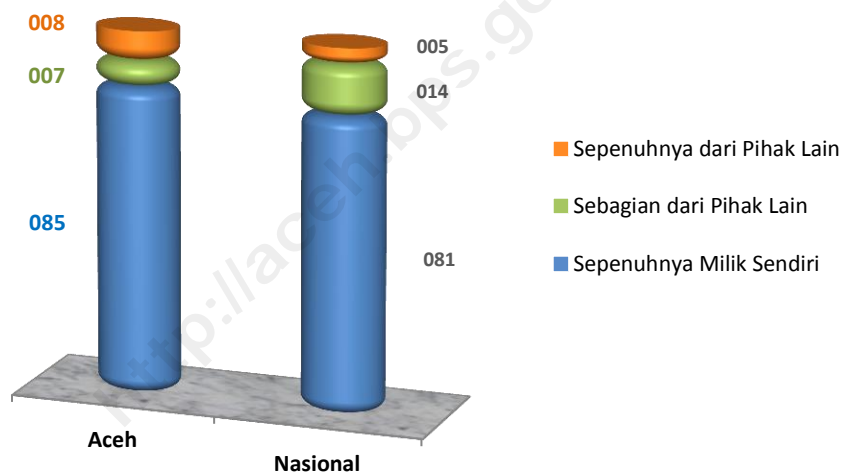
Provinsi	Jenis Kelamin	Pekerja Dibayar	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	Laki-laki	14.60	20.90	35.50
	Perempuan	13.32	51.18	64.50
	Jumlah	27.92	72.08	100.00
Nasional	Laki-laki	24.86	29.99	54.85
	Perempuan	12.01	33.14	45.15
	Jumlah	36.87	63.13	100.00

D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran

Hal penting dalam melakukan kegiatan usaha adalah bagaimana pelaku usaha menyikapi masalah kendala usaha dan menciptakan prospek peluang usaha ke depan. Beberapa variabel yang dikumpulkan dalam survei IMK 2015 antara lain; sumber permodalan, kesulitan utama dalam menjalankan usaha, keikutsertaan dalam koperasi, kemitraan usaha, serta pemasaran hasil produksi.

Ditinjau dari sumber modal (Gambar 5), terindikasi bahwa usaha IMK di Aceh sebagian besar sumber modalnya adalah milik sendiri dengan persentase 84,57 persen dan sebagian dari pihak lain sebesar 7,13 persen. Cakupan secara nasional juga memperlihatkan angka cukup tinggi pada persentase usaha dengan sumber modal milik sendiri yaitu 81,41 persen dan 14,04 persen untuk sumber modal sebagian dari pihak lain. Sedangkan yang sepenuhnya berasal dari pihak lain persentasenya cukup kecil, hanya 8,30 persen untuk Aceh dan sedikit lebih rendah untuk persentase nasional yaitu sebesar 4,55 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah dan lembaga terkait lainnya belum dirasakan maksimal oleh para pengusaha industri mikro dan kecil.

Gambar 5.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal
Tahun 2015

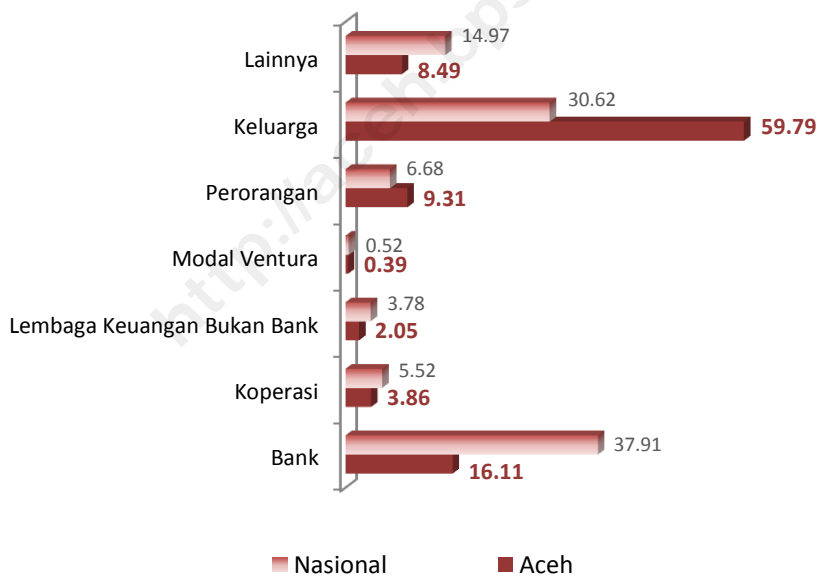


Meskipun banyak usaha IMK yang menggunakan sumber modal milik sendiri, akan tetapi sebagian pengusaha juga tetap melakukan pinjaman modal demi kelancaran dan meningkatkan usahanya. Ada beberapa sumber yang dijadikan tempat peminjaman utama oleh pengusaha untuk permodalannya, antara lain; bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, serta ada yang meminjam kepada perorangan dan keluarga.

Pengusaha IMK di Aceh yang memanfaatkan pinjaman hanyalah sekitar 15,43 persen saja, sedangkan sisanya 84,57 persen tidak memanfaatkan pinjaman. Berdasarkan asal pinjaman utama, yang melakukan pinjaman kepada keluarga menjadi urutan teratas dengan persentase 59,79 persen. Hal ini berbeda dari kondisi pada tahun 2014 dimana yang melakukan pinjaman perorangan lebih banyak diminati. Kemudian asal pinjaman yang menjadi urutan kedua paling diminati adalah pinjaman bank dengan persentase 16,11 persen. Sedangkan persentase terkecil yaitu melakukan pinjaman modal ventura sebanyak 0,39 persen saja.

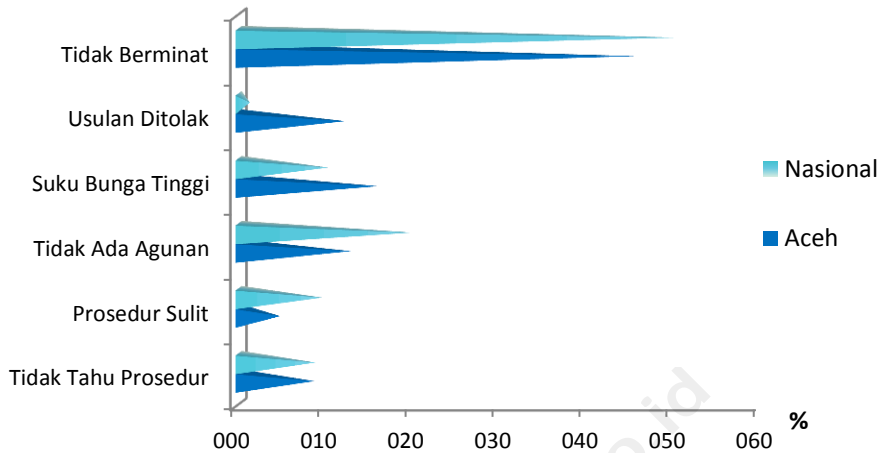
Jika kita amati dari persentase di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa para pengusaha di Aceh lebih dominan untuk memilih pinjaman kepada keluarga dikarenakan lebih mendapat kemudahan, baik tanpa harus terikat prosedur yang sulit, suku bunga pinjaman maupun jaminan (agunan).

Gambar 6.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Asal Pinjaman Utama
Tahun 2015



Dari gambar 6 juga terlihat bahwa pengusaha IMK secara nasional lebih banyak memanfaatkan pinjaman bank dengan besaran 37,91 persen. Dibandingkan dengan tahun 2014 justru pinjaman perorangan yang menempati angka teratas. Sementara itu di tahun 2015 pinjaman perorangan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 30,62 persen.

Gambar 7.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama
Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2015



Sebagian besar usaha IMK di Aceh memiliki alasan tidak meminjam dari bank dikarenakan tidak berminat dengan persentase 45,42 persen. Selanjutnya 16,02 persen beralasan suku bunga tinggi. Begitu halnya angka nasional juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi untuk usaha IMK yang tidak berminat meminjam dari bank yaitu sebanyak 50,23 persen, dan sebesar 19,85 persen memiliki alasan tidak ada agunan.

Dalam survei IMK ini juga ditanyakan kesulitan apa saja yang dihadapi oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya. Sebanyak 73,06 persen usaha mikro dan kecil di Aceh pengusahanya mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha, sedangkan pada skala nasional sebanyak 73,96 persen yang mengalami kesulitan.

Tabel 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2015

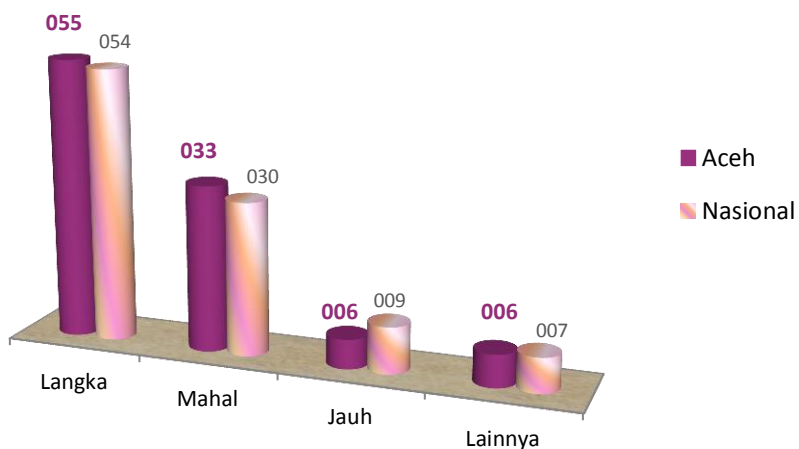
Jenis Kesulitan Utama	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Bahan Baku	9.29	22.29
Pemasaran	18.95	25.00
Modal	65.63	38.84
BBM/Energi	0.57	1.60

Transportasi	1.01	0.85
Keterampilan	1.19	2.75
Upah Buruh	0.79	1.04
Lainnya	2.57	7.63
Mengalami Kesulitan	73.06	73.96
Tidak Mengalami Kesulitan	26.94	26.04
Jumlah	100.00	100.00

Kesulitan utama yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha IMK adalah masalah modal. Sebanyak 65,63 persen usaha IMK di Aceh yang pengusahanya mengalami kesulitan modal. Kesulitan selanjutnya yang mendominasi adalah pemasaran hasil produksi dengan persentase sebesar 18,95 persen, dan kesulitan bahan baku dengan persentase 9,29 persen. Sedangkan kesulitan lain seperti masalah BBM/energi, transportasi, keterampilan, upah buruh dan lainnya, persentasenya cukup kecil yaitu hanya di bawah tiga persen saja. Namun demikian sejumlah 26,94 persen usaha IMK di Aceh tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

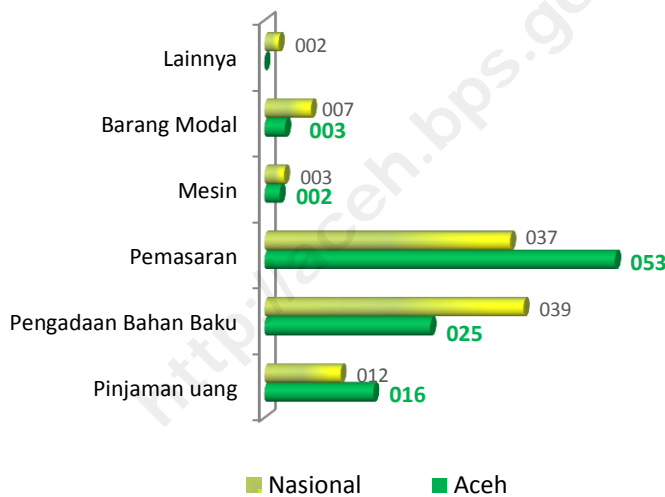
Ditinjau dari skala nasional, masalah modal juga menjadi kendala utama dalam kegiatan industri walaupun persentasenya sedikit lebih kecil dari Provinsi Aceh yaitu 38,84 persen. Kemudian disusul dengan kesulitan pemasaran barang hasil produksi sebesar 25,00 persen dan bahan baku 22,29 persen.

Gambar 8.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2015



Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa sekitar 9,29 persen usaha IMK di Aceh mengalami kesulitan utama bahan baku, dan untuk nasional sebesar 22,29 persen. Kesulitan bahan baku ini, terutama dikarenakan oleh kelangkaan bahan baku. Pada usaha IMK di Aceh persentasenya sebesar 55,02 persen, sedangkan secara nasional persentasenya sebesar 53,68 persen. Kesulitan bahan baku berikutnya dikarenakan mahal (32,71 persen) dan jauh (5,83 persen). Dapat diduga sebagian besar pengusaha yang menyatakan kesulitan bahan baku adalah usaha IMK yang memproduksi kerajinan kayu atau bahan-bahan dari kayu, juga usaha industri yang memproduksi kerajinan anyaman dari bambu dan rotan maupun rumbia.

Gambar 9.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2015



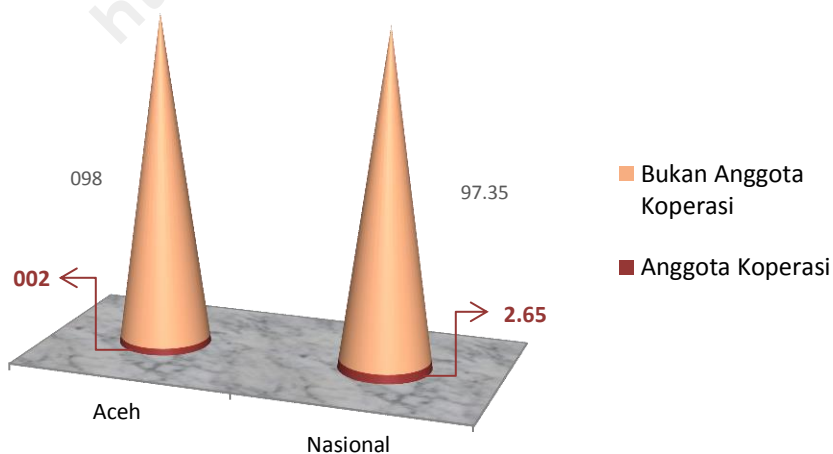
Untuk mengembangkan perusahaan diperlukan kemitraan dengan usaha lain. Kemitraan dapat bekerjasama dalam permodalan, penyediaan bahan baku atau pemasaran. Tahun 2015 persentase usaha IMK yang menjalinkan kemitraan dengan usaha lain cenderung kecil bahkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama di Aceh hanya 2,89 persen. Namun demikian dalam menjalinkan kemitraan terutama dalam hal pemasaran menduduki peringkat teratas yaitu 53,03 persen, dan pengadaan bahan baku sebesar 25,10 persen. Sedangkan dalam hal pinjaman uang persentasenya lebih sedikit yaitu 16,45 persen, kemudian barang modal maupun mesin persentasenya hanya di bawah lima persen saja.

Sedangkan kondisi nasional persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain persentasenya yaitu 9,89 persen. Dimana persentase terbesar dalam hal pengadaan bahan baku mencapai 39,19 persen. Kemudian menyusul kemitraan dalam hal pemasaran sebanyak 37,16 persen.

Tabel 7. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2015

Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
BUMN/BUMD	1.74	2.77
Swasta	16.09	32.74
Perbankan	4.84	4.03
LSM	3.44	1.51
Lainnya	73.89	58.95
Menjalinkan Kemitraan	2.89	9.89
Tidak Menjalinkan Kemitraan	97.11	90.11
Jumlah	100.00	100.00

Gambar 10.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2015



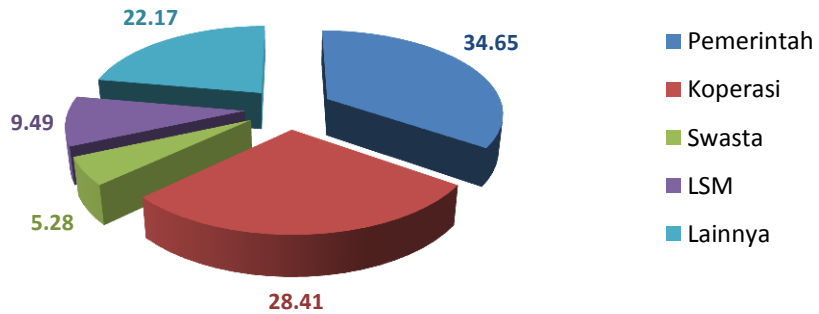
Hal yang sedikit memprihatinkan bahwa para pengusaha IMK hampir tidak tersentuh oleh koperasi. Padahal koperasi merupakan suatu wadah yang dapat digunakan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman modal dan lainnya. Karena bagaimanapun koperasi dapat diandalkan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, akan tetapi belum mampu merangkul para pengusaha IMK untuk memanfaatkan jasa koperasi dalam menjalankan usahanya. Hanya sekitar 1,99 persen usaha di Aceh yang tergabung sebagai anggota koperasi, jika dibandingkan dengan tahun 2014 lalu persentase ini sedikit meningkat. Dimana angka pada tahun sebelumnya hanya 1,47 persen. Sedangkan secara nasional persentasenya sekitar 2,65 persen.

Di samping itu, persentase usaha IMK yang menerima pelayanan/bantuan hanya sedikit saja yaitu sekitar 3,67 persen. Begitupun angka nasional juga masih rendah yaitu sekitar 4,17 persen. Sedangkan lebih dari 95 persen usaha tidak pernah memperoleh pelayanan/bantuan. Adapun usaha mikro kecil yang menerima pelayanan/bantuan dari badan maupun lembaga baik pemerintah, koperasi, swasta, LSM dan lainnya dapat berupa bantuan uang, barang modal, pengadaan bahan baku, pelayanan pemasaran, mesin dan lainnya.

Tabel 8. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan yang Diterima Setahun yang Lalu Tahun 2015

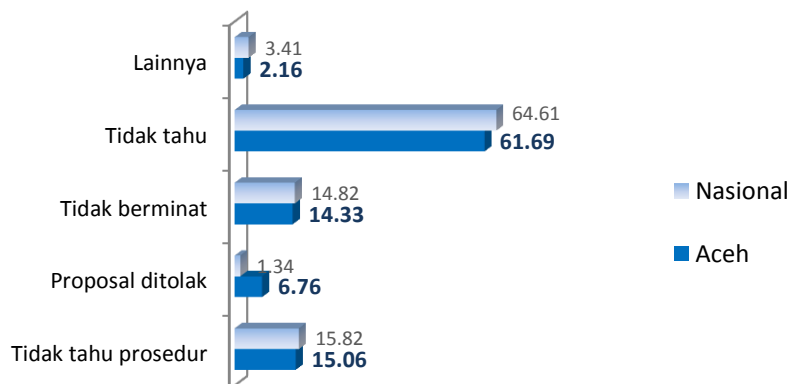
Pelayanan yang Diterima	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Uang	56.41	49.01
Bahan Baku	2.80	12.61
Pemasaran	11.79	7.90
Mesin	17.54	10.71
Barang Modal	7.99	16.78
Lainnya	3.47	2.99
Menerima Pelayanan	3.67	4.17
Tidak Menerima pelayanan	96.33	95.83
Jumlah	100.00	100.00

Gambar 11.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan
menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2015



Banyak program bantuan yang telah digulirkan pemerintah untuk meningkatkan usaha IMK di daerah. Namun bantuan tersebut hanya sedikit sekali yang dirasakan oleh para pengusaha. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya karena tidak tahu prosedur, proposal ditolak, tidak berminat, bahkan ada yang tidak tahu. Sebanyak 61,69 persen dari usaha IMK Aceh yang pengusahanya mengaku tidak tahu akan pelayanan/bantuan baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Selain itu relatif kecilnya usaha IMK yang menerima bantuan, dapat juga disebabkan dana yang dialokasikan pada bantuan pengembangan usaha industri mikro kecil masih terbatas. Sehingga ketidaktahuan pengusaha akan prosedur pelayanan serta proposal yang ditolak juga menjadi salah satu hambatan tidak diperolehnya bantuan.

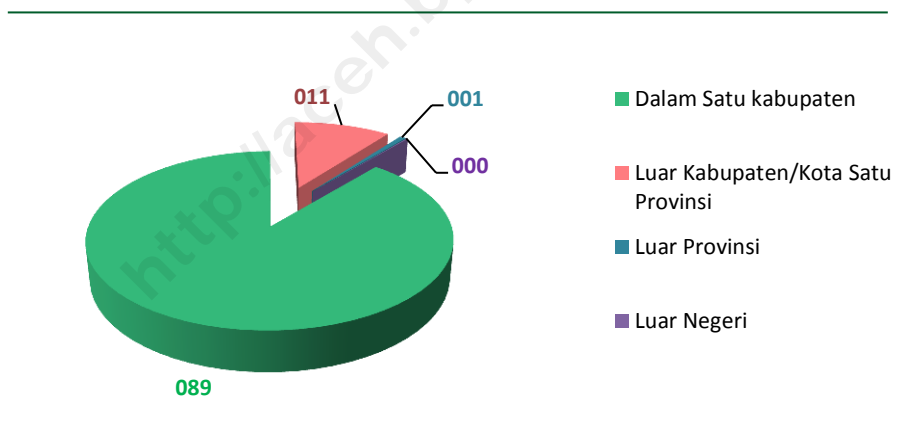
Gambar 12.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama
Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Tahun 2015



Salah satu faktor penting yang mendukung kemajuan suatu usaha industri adalah menentukan lokasi pemasaran yang tepat. Pemilihan lokasi pemasaran yang kurang tepat akan menghambat kelancaran usaha industri itu sendiri. Dengan jalinan kemitraan yang cukup terbatas, maka ruang lingkup pemasaran hasil produksi cenderung sempit. Untuk wilayah Aceh, lokasi pemasaran yang menjadi sasaran terbanyak adalah dalam satu kabupaten/kota yang mencapai 88,66 persen, kemudian luar kabupaten/kota satu provinsi sebanyak 10,50 persen. Sedangkan sisanya dipasarkan ke luar provinsi dan luar negeri dengan persentase masing-masing 0,70 persen dan 0,14 persen.

Begitu pula halnya dengan kondisi nasional, pemasaran hasil produksi lebih banyak dipasarkan dalam satu kabupaten/kota dengan persentase 89,45 persen. Sebanyak 7,98 persen dipasarkan di luar kabupaten/kota satu provinsi dan luar provinsi hanya 2,47 persen saja. Sedangkan untuk pemasaran diluar negeri rata-rata hanya dibawah satu persen dari seluruh total produksi.

Gambar 13.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran
di Provinsi Aceh Tahun 2015



Lampiran Tabel

<http://aceh.bps.go.id>

Tabel 1 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2015
Table 1 *Number of Micro and Small Scale Establishment by Group of Workers in Aceh Province 2015*

Provinsi Province	Kelompok Tenaga Kerja Group of Workers					Jumlah Total
	1	2-4	5-9	10-14	15-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34 217	29 272	1 353	130	-	65 492
Indonesia	1 316 278	2 069 573	210 975	48 540	23 507	3 668 873

Tabel 2 Persentase Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2015
Table 2 *Percentage of Establishment, Workers, Revenue, Expenditure, and Compensation of Workers of Micro and Small Scale Establishment in Aceh Province 2015*

Provinsi Province	Banyak- nya Usaha Number of Establis- hment	Tenaga Kerja Workers			Pendapat- an Revenue	Pengeluar- an Expenditure	Balas Jasa Pekerja Compensati on of Workers
		Dibayar Paid	Tidak Dibayar Unpaid	Jumlah Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	1.79	27.92	72.08	100.00	0.78	0.64	0.80
Indonesia	100.00	36.87	63.13	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 3 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 3 **Percentage of Micro and Small Scale Establishment and Average of Working Hour a Day by Working Day a Month in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan / Working Day a Month						Jumlah / Total	
	1- 10		11- 20		21- 31		Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day
	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18.87	7	26.77	6	54.36	6	100.00	6
Indonesia	10.05	6	23.75	6	66.20	7	100.00	7

Tabel 4 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 4 **Percentage of Micro and Small Scale Establishment by Level of Educational Attainment of Entrepreneurs in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Level of Educational of Entrepreneurs							Jumlah Total
	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD Elementary School	SLTP Junior High School	SLTA Senior High School	Diploma I/II Diploma I/II	Sarjana Muda/ Diploma III Diploma III	Sarjana (S1) dan Lebih Tinggi University Degree	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	15.83	31.86	26.46	22.68	0.64	0.54	1.99	100.00
Indonesia	20.37	37.94	19.36	19.41	0.34	0.57	2.01	100.00

Tabel 5 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2015**

Table 5 **Percentage of Micro and Small Scale Establishment by Age Group of Entrepreneurs in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Kelompok Umur Pengusaha Age Group of Entrepreneurs					Jumlah Total
	< 20	20 - 24	25 - 44	45 - 64	> 64	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0.30	1.58	51.28	41.85	4.99	100.00
Indonesia	0.17	1.09	40.84	50.39	7.51	100.00

Tabel 6 **Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Tahun 2015**

Table 6 **Percentage of Workers of Micro and Small Scale Establishments by Sex and Kind of Workers in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Laki-laki / Male			Perempuan / Female			Jumlah / Total		
	Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker			Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker			Jenis Tenaga Kerja / Kind of Worker		
	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total	Produksi Production	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	34.96	0.55	35.50	63.69	0.80	64.50	98.65	1.35	100.00
Indonesia	52.29	2.56	54.85	43.51	1.64	45.15	95.80	4.20	100.00

Tabel 7 **Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 7 **Percentage of Workers of Micro and Small Scale Establishments by Workers Status and Sex in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Pekerja Dibayar / Paid Worker			Pekerja Tidak Dibayar / Unpaid Worker			Jumlah / Total		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	14.60	13.32	27.92	20.90	51.18	72.08	35.50	64.50	100.00
Indonesia	24.86	12.01	36.87	29.99	33.14	63.13	54.85	45.15	100.00

Tabel 8 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 8 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Compensation of Paid Worker per Month in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar Number of Establishment with Paid Worker	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Bulan dalam Kelompok Ribuan Rupiah Compensation of Worker per Month in Group Thousand Rupiahs					
			< 100	100-249	250-499	500-999	1.000-4.999	≥ 5.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	1.79	12.60	-	1.39	6.62	17.96	73.00	1.03
Indonesia	100.00	22.85	0.91	3.46	8.71	23.02	62.01	1.89

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2015**

Table **9** **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Revenue Value on a Year in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah) Revenue Value on a Year (Millions Rupiahs)										Jumlah Total
	< 5	5 - 9	10-24	25-49	50-99	100-199	200-249	300-449	500-999	> 1000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	12.45	21.63	27.97	12.31	12.04	7.47	1.98	1.93	1.51	0.71	100.00
Indonesia	11.86	12.30	18.67	16.14	14.88	11.49	4.78	4.04	3.39	2.45	100.00

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2015**

Table **10** **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Source of Capital in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Sumber Modal Source of Capital			Jumlah Total
	Sepenuhnya Milik Sendiri Fully Owned	Sebahagian dari Pihak Lain Partially from Others	Sepenuhnya dari Pihak Lain Fully from Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	84.57	7.13	8.30	100.00
Indonesia	81.41	14.04	4.55	100.00

Tabel 11 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Asal Pinjaman Utama di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 11 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Source of Main Loan in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Memanfaat- kan Pinjaman Not Using Loan Facility	Memanfaat- kan Pinjaman Using Loan Facility	Asal Pinjaman Utama Source of Main Loan						
				Bank Bank	Koperasi Coopera- tive	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non Bank Financial Institutions	Mitra Kerja Partners	Perorang- an Individual	Keluarga Family	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	1.79	84.57	15.43	16.11	3.86	2.05	0.39	9.31	59.79	8.49
Indonesia	100.00	81.41	18.59	37.91	5.52	3.78	0.52	6.68	30.62	14.97

Tabel 12 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 12 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Main Reason for Not Having Bank Loan in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha yang Memanfaat- kan Pnjaman Number of Establishment Having Loans	Meminjam dari Bank Having Bank Loans	Tidak Meminjam dari Bank Not Having Bank Loans	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Main Reason for Not Having Bank Loan					
				Tidak Tahu Prosedur Not Knowing Procedur	Prosedur Sulit Difficulty in Procedur	Tidak Ada Agunan Not Having Collateral	Suku Bunga Tinggi Interest Rate	Usulan Ditolak Proposal Rejected	Tidak Berminat Not Interested
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	15.43	19.86	84.14	8.69	4.78	12.86	16.02	12.23	45.42
Indonesia	18.59	42.92	57.08	8.79	9.58	19.85	10.25	1.30	50.23

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2015**

Table **13** **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulties in Aceh Province 2015**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Tidak Mengalami Kesulitan Utama <i>Not Having Main Difficulties</i>	Mengalami Kesulitan Utama <i>Having Main Difficulties</i>	Jenis Kesulitan Utama <i>Kind of Main Difficulties</i>							
				Bahan Baku Raw Material <i>s</i>	Pemasar an Marketi ng	Modal Capital	BBM/ Energi Fuel/ Energy	Transpo rtasi Transpo rtation	Keteram pilan Skill	Upah Buruh Wage	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	1.79	26.94	73.06	9.29	18.95	65.63	0.57	1.01	1.19	0.79	2.57
Indonesia	100.00	26.04	73.96	22.29	25.00	38.84	1.60	0.85	2.75	1.04	7.63

Tabel **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2015**

Table **14** **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulty of Raw Material in Aceh Province 2015**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Tidak Mengalami Kesulitan <i>Not Having Difficulties</i>	Mengalami Kesulitan <i>Having Difficulties</i>		Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku <i>Kind of Main Difficulty of Raw Material</i>			
			Selain Bahan Baku <i>Except Raw Material</i>	Bahan Baku Raw Material	Langka Scarcity	Mahal Expensive	Jauh Distant	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1.79	26.94	90.71	9.29	55.02	32.71	5.83	6.44
Indonesia	100.00	26.04	77.71	22.29	53.68	30.24	9.20	6.88

Tabel 15 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Keanggotaan Koperasi dan Jenis Pelayanan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 15 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Membership of Cooperative and Kind Services Received in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Bukan Anggota Koperasi Non Member of Cooperative	Anggota Koperasi Member of Cooperative	Tidak Menerima Pelayanan Not Received Service	Menerima Pelayanan Received Service	Jenis Pelayanan yang Diterima Setahun yang Lalu Kind of Services Received a Year Ago					
						Pinjaman Uang/Barang Modal Loans in Cash/Capital Goods	Pengadaan Bahan Baku Procurement of Raw Materials	Pemasaran Marketing	Mesin Machinery	Barang Modal Capital Asset	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)
Aceh	1.79	98.01	1.99	96.33	3.67	56.41	2.80	11.79	17.54	7.99	3.47
Indonesia	100.00	97.35	2.65	95.83	4.17	49.01	12.61	7.90	10.71	16.78	2.99

Tabel 16 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 16 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Organizer of Business Partnership in Aceh Province 2015**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Menjalin Kemitraan Not Having Partnership	Menjalin Kemitraan Having Partnership	Badan/lembaga yang Menjalin Kemitraan / Organizer of Business Partnership				
				BUMN/BUMD Government	Swasta Private	Perbankan Bank	LSM NGO	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1.79	97.11	2.89	1.74	16.09	4.84	3.44	73.89
Indonesia	100.00	90.11	9.89	2.77	32.74	4.03	1.51	58.95

Tabel **Percentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalिन Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2015**

Table 17 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments with Workers Receiving Business Advisory by Kind of Business Advisory in Aceh Province 2015**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Tidak Menjalिन Kemitraan <i>Not Having Partnership</i>	Menjalिन Kemitraan <i>Having Partnership</i>	Jenis Kemitraan yang Diterima <i>Kind of Partnership Received</i>					
				Pinjaman Uang <i>Loans in Cash</i>	Pengadaan Bahan Baku <i>Procurement of Raw Materials</i>	Pemasaran <i>Marketing</i>	Mesin <i>Machine</i>	Barang Modal <i>Capital Goods</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
Aceh	1.79	97.11	2.89	16.45	25.10	53.03	2.29	3.13	0.00
Indonesia	100.00	90.11	9.89	11.51	39.19	37.16	2.96	7.04	2.14

Tabel **Percentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan menurut Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2015**

Table 18 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments Receiving Business Advisory by Organizer of Business Advisory in Aceh Province 2015**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Tidak Pernah Menerima Pelayanan/ Bantuan <i>Not Receiving Business Advisory</i>	Pernah Menerima Pelayanan /Bantuan <i>Receiving Business Advisory</i>	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan <i>Organizer of Business Advisory</i>					
				Pemerintah <i>Government</i>	Koperasi <i>Cooperati on</i>	Swasta <i>Private</i>	Perbankan <i>Bank</i>	LSM <i>NGO</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	1.79	96.33	3.67	34.65	28.41	5.28	-	9.49	22.17
Indonesia	100.00	95.83	4.17	40.67	22.60	6.60	16.92	1.99	11.22

Tabel 19 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 19 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Reason for Not Receiving Assistansthip in Aceh Province 2015**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan <i>Reason for Not Receiving Assistansthip</i>				
		Tidak Tahu Prosedur <i>Not Knowing the Procedur</i>	Proposal Ditolak <i>Proposal Rejected</i>	Tidak Berminat <i>Not Interested</i>	Tidak Tahu <i>Not Knowing</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1.79	15.06	6.76	14.33	61.69	2.16
Indonesia	100.00	15.82	1.34	14.82	64.61	3.41

Tabel 20 **Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Lokasi Pemasaran dan Pemasaran ke Luar Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2015**
Table 20 **Percentage of Micro and Small Scale Establishments by Location of Marketing and Export in Aceh Province 2015**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Lokasi Pemasaran <i>Marketing Area</i>				Pemasaran ke Luar Negeri <i>Export</i>			
		Dalam Satu Kabupaten/ Kota <i>In The District</i>	Luar kabupaten/ Kota Satu Provinsi <i>Outside The District</i>	Luar Provinsi <i>Outside The Province</i>	Luar Negeri <i>Foreign</i>	< 25%	25%- 49%	50% - 79 %	≥ 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
Aceh	1.79	88.66	10.50	0.70	0.14	99.86	-	-	0.14
Indonesia	100.00	89.45	7.98	2.47	0.10	99.81	0.03	0.89	0.07

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121

Telp : (065) 23005

Fax : (0651) 33632

Email : bps1100@bps.go.id

Homepage : <http://www.aceh.bps.go.id>